

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, *Prospek Hukum Indonesia Dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat (Hukum Pidana Materil)* Restu Agung, Jakarta, 2006.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Andi Hamzah. 2008. *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andi Hamzah, 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Raja Grafindo Persada : Jakarta
- Aristi M.A Pangaribuan, Arsa Mufti, Ichsan Zikry. 2017. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Andi Rahmah dan Amiruddin Pabbu, *Kapita Selekta Hukum Pidana Edisi 2*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Alumni Universitas Atmajaya Yogyakarta, 1999.
- Barda nawawi Arief, *kebijakan hukum pidana*, citra aditya bakti, Bandung, 2011.
- Bambang Hastaboro. 2003. "Proses Seleksi Pendidikan Pengembangan Umum Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri," Jakarta: Jurnal Polisi Indonesia No. 5
- , *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kenca Media Gruop Jakarta, 2007.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan: Tinjauan Kritis terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- E. Y. Kanter dan S. R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta: 2002.

- Fujlurrahman Jurdi, *Hubungan Kewenangan Antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar 2010.
- Fockema Andrea, *Kamus Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- Guse Prayudi, *Tindak Pidana Korupsi, Dipandang dalam Berbagai Aspek*, Pustaka press, Yogyakarta 2010.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, Jakarta 2001.
- Hakristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Signergistis untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6 Tahun 2003/2004
- Hibnu Nugroho, *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Media Aksara Prima, Jakarta, 2012
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Indriyanto Seno Adji. 2012. *Korupsi & Permasalahannya*. Jakarta: Diadit Media Press.
- Juni Sjafiren Jahja. 2012. *Say No To Korupsi!: Mengenal, Mecegah dan Meberantas Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Visi Media.
- Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, Bandung, 2015.
- Laden Marpaung, *Korupsi dalam arti luas*, Sinar Grafika Jakarta 2009
- Lamintang P.A.F, *dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2004.
- M husen Harun, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Masri Singarimbun dan Sofian Effendi (ED), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1989.
- M. Husein harun. 1991. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. Jakarta: PT rineka cipta.

- Moh. Hatta. 2009. *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana Khusus*. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi, *Kebijakan Kriminal Terhadap Cybercrime*, Majalah Media Hukum 2003.
- Muladi dan Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media Yogyakarta, 2009.
- Mursalim. 2017. *Kewenangan Penyidik Polri dalam Penanganan Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Al-Hikam*
- Mulyono, MA, *Konsep Pembiayaan Pendidikan*, Jogjakarta: Arruzz Media, 2010.
- Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2018.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.
- Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Menengah Atas Tahun 2015.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2015.
- Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Pada Madrasah Tahun Anggaran 2019
- RE Bringbing, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, pusat kajian reformasi, Jakarta, 2009.
- Riadi Asra rahmad, *Hukum Acara Pidana*, rajawali press, depok, 2017. Roscoe pond, *Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta, 2009.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2012.
- Syunu Trihantoyo, *Manajemen Keuangan Pendidikan*, Surabaya, Pustaka Aksara, 2020.
- Sahuri Lasmadi, *Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi Pada Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 3, Universitas Jenderal Soedirman Fakultas Hukum, Purwokerto, Juli, 2010.
- Sudarto, *Hukum Pidana I*, Semarang, Yayasan Sudarto, 1990.
- Suhendar, “*Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Dan Kerugian Keuangan Negara Dalam Optik Hukum Pidana*”. PALEV JOURNAL OF LAW, Volume 1 Issue 1, August 2018, hlm. 85-100.
- Sadjipto Raharjo. 1999. *Hukum dan Perubahan Sosial*, Bandung : Alumni.
- Suprpto, S., Fahrianoor. 2004. *Komunikasi Penyuluhan Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta : Arti Bumi Intaran.
- W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, Grasindo, Jakarta 2004.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Achmad Surya, “*Problematika Penyidik Dalam Penetapan Tersangka Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Di Kabupaten Aceh Tengah* “. Resam Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 1, April 2018, Hlm. 1-16.
- Rizqa Octarina, “*Pembiayaan Pendidikan Di Lembaga Pendidikan Islam*,” Jurnal Menata Vol. 3, no. 1 2020.
- Transparency *International Indonesia. Hasil Survei CPI (Corruption Perception Index) tahun 2022*. Diakses di <https://ti.or.id/> pada tanggal 31 Oktober 2023.
- Tren Penindakan Korupsi tahun 2022. Diakses di <https://antikorupsi.org/id/> pada tanggal 31 Oktober 2023.